BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Pemberitaan mengenai konflik antara transportasi berbasi online dan juga transportasi konvensional pada media online kompas.com dan tempo.co dinilai memiliki nilai penting di dalamnya. Kedua media ini merupakan media online besar di Indonesia, dan juga media yang memiliki ideologi sendiri dalam pemuatan beritanya, kemudian mereka juga memiliki latar belakang masing-masing yang tentu berbeda. Pada bulan Februari-Maret 2017, pemberitaan mengenai konflik ini banyak dimuat dikedua media tersebut. Terutama pada bulan Maret 2017, karena puncak prseteruan ini terjadi pada bulan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis Framing model Robert N. Entman. Dan model Entman ini melihat bagaimana sebuah media membingkai sebuah berita dari *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *tretament recommendation* (menekankan penyelesaian).

A. Temuan

1. Kategori :Fase Konfrontasi

Kategori ‘Fase Konfrontasi’ ini melihat bagaimana berita tersebut penyebab konflik yang mulai terbuka antara transportasi berbasis online dan konvensional.

a. Berita kompas.com dengan judul *“Protes Angkutan "Online", Sudah 3 Hari Sopir Angkot di Malang Mogok”*, 8 Maret 2017/21:48 WIB

“Protes Angkutan "Online", Sudah 3 Hari Sopir Angkot di Malang Mogok”

MALANG, KOMPAS.com - Sudah tiga hari sopir angkot di Kota Malang mogok beroperasi. Mereka merasa belum puas dengan keputusan Pemerintah Kota Malang terkait dengan tuntutannya terhadap angkutan online yang mulai banyak beroperasi di Kota Malang.

"Kami ingin sikap yang jelas dari pemerintah," kata Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Ipung Purwono kepada Kompas.com, Rabu (8/3/2017).

Pada Selasa (7/3/2017) kemarin, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi serta pihak Kepolisian sudah mengeluarkan keputusan terkait polemik dua model angkutan itu.

Pemerintah berjanji akan melakukan penertiban terhadap angkutan online di Kota Malang yang tidak memiliki izin operasional. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memastikan bahwa semua angkutan online yang ada di Malang tidak memiliki izin operasional.

Praktis, semua angkutan online di Kota Malang akan ditertibkan. Namun, janji pemerintah melakukan penertiban itu belum memuaskan para sopir angkot. Mereka tetap mogok beroperasi dan meminta ada peraturan yang mengikat terkait keputusan pemerintah yang ingin menertibkan angkutan online.

"Kami sudah ada komunikasi. Tapi keputusannya jelas. Kami maunya ada produk hukum, ada Perwal (Peraturan Wali Kota)," katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya tidak akan memiliki landasan hukum yang kuat jika keputusan untuk menertibkan angkutan online itu tidak dituangkan dalam aturan yang mengikat. "Hanya kesepakatan belum kuat mas. Kami ingin ada pegangan," ucapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengatakan, satu-satunya langkah untuk menghentikan gejolak sopir angkot adalah tanda tangan dari Wali Kota Malang M Anton terkait kesepakatan penertiban angkutan online.

"Wali Kota. Tanda tangan Wali Kota," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi mengaku tidak mengerti dengan keinginan para sopir angkot itu. Sebab dirinya merasa sudah mengeluarkan keputusan yang menguntungkan mereka.

"Makanya saya tidak tahu permintaan mereka itu apa. Saya tidak tahu mereka maunya apa. Kok masih mogok," tuturnya.

Sementara itu, sejumlah relawan dan petugas dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, anggota Polres Malang Kota dan anggota Kodim 0833 Kota Malang masih setia mengangkut penumpang yang terlantar. Tidak terhitung jumlah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang itu.

Setiap kendaraan yang disediakan memiliki jalur tersendiri seperti jalur trayek angkot. Bahkan, mobil berplat merah milik Pemerintah Kota Malang ikut diturunkan mengangkut para penumpang tersebut.

(sumber:https://regional.kompas.com/read/2017/03/08/21481181/protes.angkutan.online.sudah.3.hari.sopir.angkot.di.malang.mogok.)

Define Problem: Berita yang ditulis oleh kompas.com di atas menjelaskan bahwa terdapat aksi mogok operasi dari angkot kota Malang selama tiga hari, kutipan define problem tersebut terdapat pada paragraf pertama alam media online kompas,com edisi 8 Maret 2017, sebagai berikut:

“Sudah tiga hari sopir angkot di Kota Malang mogok beroperasi.....”

Diagnose causes: Kemudian, penyebab aksi terebut ialah Mereka merasa belum puas dengan keputusan Pemerintah Kota Malang terkait dengan tuntutannya terhadap angkutan online yang mulai banyak beroperasi di Kota Malang. Untuk penyebab dari aksi tersebut, *diagnose causes* terletak pada paragraf pertama, kalimat kedua dalam media online kompas.com edisi 8 Maret 2107 ini, sebagai berikut:

> “Mereka merasa belum puas dengan keputusan Pemerintah Kota Malang terkait dengan tuntutannya terhadap angkutan online yang mulai banyak beroperasi di Kota Malang.”

Moral Judgement. Untuk *moral judgement*, kompas.com menuliskan bahwa pihak sopir angkot menyatakan mereka tidak akan memiliki landasan hukum yang kuat jika keputusan untuk menertibkan angkutan online itu tidak dituangkan dalam aturan yang mengikat seperti produk hukum. Hal ini diungkapkan pada bagian paragraf ketujuh pada media online kompas.com edisi 8 Maret 2017 yaitu:

> “Dia menyebutkan, pihaknya tidak akan memiliki landasan hukum yang kuat jika keputusan untuk menertibkan angkutan online itu tidak dituangkan dalam aturan yang mengikat. "Hanya kesepakatan belum kuat mas. Kami ingin ada pegangan," ucapnya.”

Treatment Recommendation. Berita tersebut juga menyebutkan *tretament recommendation*, di mana Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengatakan, satu-satunya langkah untuk menghentikan gejolak sopir angkot adalah tanda tangan dari Wali Kota Malang M Anton terkait kesepakatan penertiban angkutan online. Hal ini diungkapkan pada paragraf delapan dan kutipan langsung di paragraf sembilan pada media online kompas.com edisi 8 Maret 2017, sebagai berikut:

“Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengatakan, satu-satunya langkah untuk menghentikan gejolak sopir angkot adalah tanda tangan dari Wali Kota Malang M Anton terkait kesepakatan penertiban angkutan online.”

"Wali Kota. Tanda tangan Wali Kota," katanya.”

Tabel 3.1

Pembingkaian berita kompas.com dengan judul “Protes Angkutan "Online", Sudah 3 Hari Sopir Angkot di Malang Mogok”

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Tiga hari sopir angkot di Kota Malang mogok beroperasi.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Para sopir angkot ini merasa belum puas dengan keputusan Pemerintah Kota Malang terkait dengan tuntutannya terhadap angkutan online yang mulai banyak beroperasi di Kota Malang.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Pihak Organda mengaku tidak akan memiliki landasan hukum yang kuat jika keputusan untuk menertibkan angkutan online itu tidak dituangkan dalam aturan yang mengikat.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, mengatakan, satu-satunya langkah untuk menghentikan gejolak sopir angkot adalah tanda tangan dari Wali Kota Malang M Anton terkait kesepakatan penertiban angkutan online.

b. Berita tempo.co dengan judul: ‘*Protes Angkutan Online, Sebagian Angkot Tangerang Tetap Mogok’,* Senin, 8 Maret 2017 09:11 WIB

“Protes Angkutan Online, Sebagian Angkot Tangerang Tetap Mogok ”

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian angkutan di Kota Tangerang tetap menggelar aksi mogok pada Rabu pagi, 8 Maret 2017. Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan para sopir angkutan dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bahwa angkot tak akan mogok.

Seperti puluhan sopir angkutan R 07 rute Binong-Malabar. Mereka berkumpul di depan Giant Palem Semi, Karawaci, sejak pagi tadi. "Kami meminta adanya realisasi penanganan masalah angkutan online ini selama tiga hari ke depan. Bila tidak ada realisasinya dari para pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan ini, kami akan melakukan aksi lebih dari hari ini pada Jumat mendatang," ucap koordinator lapangan angkutan R 07, Umar.

Puluhan sopir beserta angkutan ini berkumpul di Jalan Imam Bonjol. Mereka akan bergerak ke Kantor Wali Kota Tangerang untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut pemerintah memberikan solusi terkait dengan maraknya angkutan online yang mengikis pendapatan mereka. Namun petugas kepolisian berusaha membujuk para sopir ini untuk tidak melanjutkan aksi demo karena telah ada kesepakatan bersama yang diteken di Dinas Perhubungan Kota Tangerang tadi malam. "Intinya, tuntutan para sopir angkutan itu akan dimediasi oleh Pemerintah Kota Tangerang," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani.

Ruslani menduga, karena kesepakatan itu dilakukan hingga larut malam, ada kemungkinan banyak sopir angkutan yang belum menerima informasi itu. "Karena aksi ini meliputi 29 trayek angkutan di Kota Tangerang," tutur Ruslani.

Ketua Kelompok Kerja Subunit T 03 Rure Poris Plawad-Cadas, Jumroni, yang ikut dalam perundingan tadi malam, mengakui banyak sopir angkutan yang belum mendapat informasi terkait dengan batalnya aksi mogok hari ini. "Sampai pagi ini, informasi batal aksi terus kami sampaikan secara berantai," katanya.

(sumber:https://metro.tempo.co/read/853719/protes-angkutan-online-sebagian-angkot-tangerang-tetap-mogok)

Define Problem. Berita yang diterbitkan oleh tempo.co ini menjelaskan sebagian angkutan di Kota Tangerang tetap menggelar aksi mogok pada Rabu pagi, 8 Maret 2017. Dan define problem pada berita ini terletak pada tempo.co edisi 8 Maret 2017 ini ialah kalimat sebagai berikut:

> "Sebagian angkutan di Kota Tangerang tetap menggelar aksi mogok pada Rabu pagi, 8 Maret 2017."

Diagnose Causes. Peristiwa itu sendiri terjadi karena mereka menuntut pemerintah memberikan solusi terkait dengan maraknya angkutan online yang mengikis pendapatan mereka.. Hal ini dituliskan pada paragraf ketiga dalam kalimat kedua tempo.co edisi 8 Maret 2017 yaitu sebagai berikut:

> "Mereka menuntut pemerintah memberikan solusi terkait dengan maraknya angkutan online yang mengikis pendapatan mereka."

Moral Judgement. Dan untuk make moral judgement, tempo.co menuliskan bahwa adanya pernyataan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani bahwa tuntutan para sopir angkutan itu akan dimediasi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini diungkapkan langsung dalam tempo.co edisi 9 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Intinya, tuntutan para sopir angkutan itu akan dimediasi oleh Pemerintah Kota Tangerang," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani."

Treatment Recommendation. Sehingga, untuk *treatment recommendation* pada berita ini ialah petugas kepolisian berusaha membujuk para sopir ini untuk tidak melanjutkan aksi demo karena telah ada kesepakatan bersama yang diteken di Dinas Perhubungan Kota Tangerang tadi malam. Hal ini diutarakan oleh Anton pada paragraf ketiga pada berita di tempo.co edisi 9 Maret 2017, yaitu:

> "Namun petugas kepolisian berusaha membujuk para sopir ini untuk tidak melanjutkan aksi demo karena telah ada kesepakatan bersama yang diteken di Dinas Perhubungan Kota Tangerang tadi malam."

Tabel 3.2

Pembingkaian berita tempo.co dengan judul "Protes Angkutan Online, Sebagian Angkot Tangerang Tetap Mogok "

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Sebagian angkutan di Kota Tangerang tetap menggelar aksi mogok pada Rabu pagi, 8 Maret 2017.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Mereka menuntut pemerintah memberikan solusi terkait dengan maraknya angkutan online yang mengikis pendapatan mereka.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Adanya pernyataan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani bahwa tuntutan para sopir angkutan itu akan dimediasi oleh Pemerintah Kota Tangerang
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Namun petugas kepolisian berusaha membujuk para sopir ini untuk tidak melanjutkan aksi demo karena telah ada kesepakatan bersama yang diteken di Dinas Perhubungan Kota Tangerang tadi malam.

2. Kategori: Fase Krisis

Pada kategori "Fase Krisis" ini melihat bagaimana berita tersebut menggambarkan konflik ini semakin meluas dan membesar antara pengemudi transportasi berbasis online dan konvensional

a. Berita kompas.com dengan *judul "Sopir Angkot dan Ojek "Online" di Bogor Saling Serang"*, 20 Maret 2017/20:44 WIB

'Sopir Angkot dan Ojek "Online" di Bogor Saling Serang'

Bogor, KOMPAS.com - Keributan antara para sopir angkutan perkotaan (angkot) dengan pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Bogor berimbas pada aksi saling serang antarkedua kelompok, Senin (20/3/2017).

Bentrokan tersebut dipicu karena dari masing-masing pihak menjadi korban pengeroyokan. Pantauan Kompas.com hingga pukul 19.00 WIB, sejumlah titik di Bogor terjadi "medan tempur" antara pengemudi ojek online dengan para sopir angkot.

Di persimpangan Mall BTM, bentrokan antara keduanya pecah ketika salah satu pengemudi ojek online dikeroyok oleh para sopir angkot ketika hendak menurunkan penumpang di daerah itu.

Salah satu petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Faizal mengatakan, pemukulan tersebut berimbas terjadinya serangan balik dari para pengemudi ojek online.

"Korban yang dipukul terus lapor ke teman-temannya. Kemudian mereka menyerang balik para sopir angkot itu," ucap Faizal, di lokasi.

Kata Faizal, akibat peristiwa itu, satu mobil angkot jadi bulan-bulanan dan rusak parah. Pelaku pemukulan, sambung Faizal, diamankan setelah petugas datang ke lokasi kejadian.

"Sopir angkot yang mukul sudah dibawa polisi. Sempet macet panjang juga di sini pas kejadian," imbuhnya.

Bentrokan tak hanya terjadi di Simpang Mall BTM, Kota Bogor saja. Keributan terparah antara sopir angkot dan ojek online terjadi di Jalan Abdullah bin Nuh, Yasmin, Kota Bogor.

Satu orang sopir angkot menjadi korban pengeroyokan oleh pengemudi ojek online. Ratusan orang pengemudi ojek online terlihat berkumpul di pinggir jalan untuk melakukan sweeping terhadap para sopir angkot yang melintas di kawasan tersebut.

Petugas kepolisian dengan dilengkapi senjata berkumpul di lokasi untuk mengamankan situasi pasca-bentrokan itu terjadi.

Kepala Polsek Bogor Barat Komisaris Polisi Indraningtyas mengungkapkan, penyerangan itu ditenggarai karena mereka saling membela kelompoknya masing-masing.

"Kita masih selidiki ini. Saling membela kelompoknya, jadi mereka saling balas-membalas. Masih kita cari pelakunya siapa," singkatnya.

(sumber:http://regional.kompas.com/read/2017/03/20/20445651/sopir.angkot.dan.ojek.online.di.bogor.saling.serang)

Define Problem. Berita yang ditulis oleh kompas.com di atas menjelaskan adanya keributan antara para sopir angkutan perkotaan (angkot) dengan pengemudi ojek online di daerah Bogor, sehingga menyebabkan aksi saling serang antar kedua kelompok tersebut. Kutipan define problem tersebut terdapat pada paragraf pertama alam media online kompas,com edisi 20 Maret 2017, sebagai berikut:

> "Keributan antara para sopir angkutan perkotaan (angkot) dengan pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Bogor berimbas pada aksi saling serang antarkedua kelompok,".

Diagnose Causes: Kemudian, penyebab aksi saling serang tersebut dikarenakan aksi kedua belah pihak yang saling membela rekan kerjanya. Di mana masing-masing pihak menjadi korban pengeroyokan, dan kemudian supir ojek online dikeroyok oleh para supir angkot, yang kemudian pengendara ojek online melaporkan kepada teman-temannya dan terjadilah serangan balik dari para supir ojek online. Untuk penyebab dari aksi tersebut, diagnose causes terletak hampir ada di semua paragraf. Seperti paragraf dua sampai lima dan lebih dijelaskan pada paragraf sebelas dalam media online kompas.com edisi 20 Maret 2107 ini, sebagai berikut:

> "Bentrokan tersebut dipicu karena dari masing-masing pihak menjadi korban pengeroyokan. Pantauan Kompas.com hingga pukul 19.00 WIB, sejumlah titik di Bogor terjadi "medan tempur" antara pengemudi ojek online dengan para sopir angkot."

> "Kita masih selidiki ini. Saling membela kelompoknya, jadi mereka saling balas-membalas. Masih kita cari pelakunya siapa...,"

Moral Judgement. Untuk moral judgement, kompas.com menuliskan dengan pernyataan bahwa Polsek Bogor Barat masih melakukan penyelidikan terhadap siapa pelaku dalam kejadian tersebut. Hal ini diungkapkan pada

bagian paragraf terakhir pada media online kompas.com edisi 20 Maret 2017 yaitu:

> "Kita masih selidiki ini. Saling membela kelompoknya, jadi mereka saling balas-membalas. Masih kita cari pelakunya siapa," ujar Kepala Polsek Bogor Barat Komisaris Polisi Indraningtyas.

Treatment Recommendation. Berita tersebut juga menyebutkan tretament recommendation, di mana pasca peristiwa bentrok tersebut, petugas kepolisian dengan dilengkapi senjata berkumpul untuk mengamankan lokasi kejadian. Hal ini diungkapkan pada paragraf sembilan pada media online kompas.com edisi 20 Maret 2017, sebagai berikut:

> "Petugas kepolisian dengan dilengkapi senjata berkumpul di lokasi untuk mengamankan situasi pasca-bentrokan itu terjadi."

Tabel 3.5

Pembingkaian berita kompas.com dengan judul "Sopir Angkot dan Ojek "Online" di Bogor Saling Serang"

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Terjadi keributan antara para sopir angkutan perkotaan (angkot) dengan pengemudi ojek online di wilayah Bogor.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Bentrokan terjadi karena aksi saling membela rekannya yang menjadi korban pengeroyokan.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Polsek Bogor Barat masih menyelidiki siapa pelakunya.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Aparat bersenjata mengamankan lokasi pasca bentrok.

b. Berita tempo.co dengan judul: *'Aksi Mogok Angkot dan Sweeping Ojek Online di Bogor Meluas "'*, 21 Maret 2017/13:32 WIB

"Aksi Mogok Angkot dan Sweeping Ojek Online di Bogor Meluas "'

TEMPO.CO, Jakarta – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah Kota dan Kabupaten Cibinong melanjutkan aksi mogok massal dengan tidak mengangkut penumpang, Selasa, 21 Maret 2017, sejak pagi hingga siang. Pada hari kedua, aksi mogok massal yang terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor ini semakin meluas. Di belasan titik lokasi sopir angkutan melakukan aksi sweeping dan penghadangan terhadap pengemudi transportasi online.

"Sejak pagi, sopir angkot mogok beroperasi, bahkan mereka menghentikan sejumlah pengendara motor yang dicurigai sebagai ojek online," kata Rismanto, 34 tahun, warga Sukahati, Cibinong, Selasa, 21 Maret 2017.

Rismanto mengatakan menjadi salah satu pengemudi sepeda motor yang diberhentikan oleh sopir angkot, karena dicurigai sebagai ojek online dan mencari kesempatan menaikkan penumpang.

"Tadi saya sempat dihentikan karena saya membonceng anak berangkat kerja di Cilodong," ucapnya.

Dia mengatakan, pada saat dirinya dihentikan, sejumlah sopir angkot memeriksa telepon seluler yang digunakannya untuk memastikan pengemudi ojek online atau pengendara biasa. "HP saya dicek karena untuk memastikan apakah terpasang aplikasi ojek online atau tidak," kata Rismanto.

Di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, aksi sweeping ojek online tersebut terjadi di belasan titik, di antaranya Simpang Jalan Pemda, bawah jalan layang Pasar Cibinong, Citeureup, Cileungsi, dan Terminal Bubulak.

Untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping balasan, puluhan petugas dari Kepolisian Polresta Bogor, Polres Bogor, dibantu petugas Brimob Polda Jawa Barat dan TNI berjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan karena dijadikan sebagai lokasi aksi mogok angkot.

(sumber: https://metro.tempo.co/read/858035/aksi-mogok-angkot-dan-sweeping-ojek-online-di-bogor-meluas)

Define Problem. Berita ini menjelaskan bahwa Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah Kota dan Kabupaten Cibinong melanjutkan aksi mogok massal dengan tidak mengangkut penumpang. *Define problem*

pada berita ini dijelaskan pada paragraf pertama dalam media online tempo.co edisi 21 Maret 2017 yaitu sebagai berikut:

> "Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah Kota dan Kabupaten Cibinong melanjutkan aksi mogok massal dengan tidak mengangkut penumpang, Selasa, 21 Maret 2017, sejak pagi hingga sian."

Diagnose Causes. Aksi sweeping ini dilakukan karena protes yang berkelanjutan mengenai penolakan terhadap transportasi berbasis online. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf pertama dalam tempo.co edisi 21 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Pada hari kedua, aksi mogok massal yang terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor ini semakin meluas. Di belasan titik lokasi sopir angkutan melakukan aksi sweeping dan penghadangan terhadap pengemudi transportasi online."

Treatment recommendation. Treatment Recommendation yang ditunjukkan pada berita ini untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping balasan, puluhan petugas dari Kepolisian Polresta Bogor, Polres Bogor, dibantu petugas Brimob Polda Jawa Barat dan TNI berjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan karena dijadikan sebagai lokasi aksi mogok angkot. Hal ini diungkapan dalam tempo.co edisi 21 Maret 2017 pada paragraf terakhir, sebagai berikut:

> "Untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping balasan, puluhan petugas dari Kepolisian Polresta Bogor, Polres Bogor, dibantu petugas Brimob Polda Jawa Barat dan TNI berjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan karena dijadikan sebagai lokasi aksi mogok angkot."

Tabel 3.4

Pembingkaian berita tempo.co dengan judul "Aksi Mogok Angkot dan Sweeping Ojek Online di Bogor Meluas "

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di wilayah Kota dan Kabupaten Cibinong melanjutkan aksi mogok massal dengan

	tidak mengangkut penumpang.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Aksi ini dilakukan karena protes yang berkelanjutan mengenai penolakan terhadap transportasi berbasis online
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	-
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping balasan, puluhan petugas dari Kepolisian Polresta Bogor, Polres Bogor, dibantu petugas Brimob Polda Jawa Barat dan TNI berjaga di sejumlah titik yang dianggap rawan karena dijadikan sebagai lokasi aksi mogok angkot.

3. Kategori: Fase Konflik Menurun

Pada kategori ‘‘fase Konflik Menurun’’ dalam konflik ini melihat bagaimana berita tersebut menggambarkan konflik antara transportasi berbasis online dan konvensional sudah mulai menurun.

a. Berita kompas.com dengan judul: *‘Polisi: Organda dan Ojek "Online" di Tangerang Janji Tak Bentrok Lagi’,* 9 Maret 2017/10:43 WIB

“Polisi: Organda dan Ojek "Online" di Tangerang Janji Tak Bentrok Lagi’

TANGERANG, KOMPAS.com - Kapolres Metro Tangerang, Banten, Komisaris Besar Harry Kurniawan menyebutkan, telah tercapai kesepakatan antara Organda Kota Tangerang dan perwakilan ojek online, setelah pihaknya memediasi pertemuan dengan kedua pihak itu pada Rabu (8/3/2017) malam.

Mediasi dilakukan setelah pada Rabu pagi hingga sore kedua kubu bentrok. Bentrokan berawal dari unjuk rasa sopir angkot terhadap ojek online.

"Sudah ditandatangani surat pernyataan bersama dari kedua belah pihak yang menyatakan kejadian kemarin merupakan kesalahpahaman," kata Harry kepada Kompas.com, Kamis pagi ini.

Dalam surat pernyataan bersama itu, ada dua poin kesepakatan. Pertama, kedua belah pihak menyadari dan mengakui bentrok di antara mereka sebagai kesalahpahaman dan masalah akan diselesaikan secara kekeluargaan, saling memaafkan, dan berjanji tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari.

Poin kedua, kedua belah pihak berjanji untuk tetap menjaga suasana kondusif di Kota Tangerang dan tidak main hakim sendiri. Bila masih ada yang melanggar kesepakatan ini, maka siap untuk diproses hukum oleh pihak kepolisian.

Surat pernyataan bersama ditandatangani Ketua Organda Kota Tangerang Eddi Faisal dan pembina GoGrabber Tangerang Raya Ferry Budhi.

Surat pernyataan itu turut diketahui oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Dandim 0506 Tangerang Letkol Inf MI Gogor, dan Harry sendiri.

Dari pantauan Kompas.com, sejumlah angkot dan ojek online sudah kembali beroperasi sejak tadi pagi. Bedanya, kebanyakan ojek online tidak mengenakan atribut khas mereka seperti helm maupun jaket yang bertuliskan nama perusahaan ojek online.

(sumber:https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/09/10431371/polisi.organda.dan.ojek.online.di.tangerang.janji.tak.bentrok.lagi.)

Define Problem. Berita ini menjelaskan bahwa Kapolres Metro Tangerang, Banten, Komisaris Besar Harry Kurniawan menyebutkan, telah tercapai kesepakatan antara Organda Kota Tangerang dan perwakilan ojek online, setelah pihaknya memediasi pertemuan dengan kedua pihak itu pada Rabu (8/3/2017) malam. *Define problem* pada berita ini dijelaskan pada paragraf pertama dalam media online kompas.com edisi 9 Maret 2017 yaitu sebagai berikut:

> "Kapolres Metro Tangerang, Banten, Komisaris Besar Harry Kurniawan menyebutkan, telah tercapai kesepakatan antara Organda Kota Tangerang dan perwakilan ojek online, setelah pihaknya memediasi pertemuan dengan kedua pihak itu pada Rabu (8/3/2017) malam."

Diagnose Causes. Mediasi dilakukan setelah pada Rabu pagi hingga sore kedua kubu bentrok. Bentrokan berawal dari unjuk rasa sopir angkot terhadap ojek online. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf kedua dalam kompas.com edisi 9 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Mediasi dilakukan setelah pada Rabu pagi hingga sore kedua kubu bentrok. Bentrokan berawal dari unjuk rasa sopir angkot terhadap ojek online."

Moral Judgement. Make moral judgement dari peristiwa ini adalah sejumlah angkot dan ojek online sudah kembali beroperasi sejak tadi pagi. Bedanya, kebanyakan ojek online tidak mengenakan atribut khas mereka seperti helm maupun jaket yang bertuliskan nama perusahaan ojek online. Hal terdapat pada paragraf terakhir dalam kompas.com edisi 9 Maret 2017 sebagai berikut

> ".....sejumlah angkot dan ojek online sudah kembali beroperasi sejak tadi pagi. Bedanya, kebanyakan ojek online tidak mengenakan atribut khas mereka seperti helm maupun jaket yang bertuliskan nama perusahaan ojek online."

Treatment recommendation. Treatment Recommendation yang ditunjukkan pada berita ini ialah Surat pernyataan bersama ditandatangani Ketua Organda Kota Tangerang Eddi Faisal dan pembina GoGrabber Tangerang Raya Ferry Budhi. Hal ini diungkapan dalam kompas.com edisi 9 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Surat pernyataan bersama ditandatangani Ketua Organda Kota Tangerang Eddi Faisal dan pembina GoGrabber Tangerang Raya Ferry Budhi."

Tabel 3.5

Pembingkaian berita kompas.com dengan judul "Besok, Pemkot Bogor Pertemukan Sopir Angkot dan Ojek "Online"'

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem	Kapolres Metro Tangerang, Banten,

(Pendefinisian Masalah)	Komisaris Besar Harry Kurniawan menyebutkan, telah tercapai kesepakatan antara Organda Kota Tangerang dan perwakilan ojek online, setelah pihaknya memediasi pertemuan dengan kedua pihak itu pada Rabu (8/3/2017) malam.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Mediasi dilakukan setelah pada Rabu pagi hingga sore kedua kubu bentrok. Bentrokan berawal dari unjuk rasa sopir angkot terhadap ojek online.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Sejumlah angkot dan ojek online sudah kembali beroperasi sejak tadi pagi. Bedanya, kebanyakan ojek online tidak mengenakan atribut khas mereka seperti helm maupun jaket yang bertuliskan nama perusahaan ojek online.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Surat pernyataan bersama ditandatangani Ketua Organda Kota Tangerang Eddi Faisal dan pembina GoGrabber Tangerang Raya Ferry Budhi.

b. Berita tempo.co dengan judul: *'Angkot Mogok, Dishub Tangerang Janji Tertibkan Angkutan Online',* Rabu, 8 Maret 2017/12:41 WIB

"Angkot Mogok, Dishub Tangerang Janji Tertibkan Angkutan Online"

TEMPO.CO, Tangerang - Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saepul Rohman memastikan akan menertibkan angkutan berbasis online. Dinas Perhubungan akan menggandeng Kepolisian Metropolitan Tangerang Kota dalam penertiban nanti. Langkah ini sebagai respon atas tuntutan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang meminta angkutan online ditertibkan.

"Kami sudah sepakati akan menertibkan angkutan online yang ngetem, tapi juga angkutan bertrayek yang melanggar aturan misalnya parkir di

sembarang tempat. Ini mengganggu lalu-lintas," kata Saepul kepada Tempo, Rabu, 8 Maret 2017.

Saepul mengatakan pihaknya bersama Polrestro Tangerang dihadiri KKSU telah bertemu dan merumuskan solusi untuk membatalkan aksi mogok pengemudi angkot yang sedianya digelar hari ini. "Memang sempat mereka (-angkutan umum berkumpul) karena informasi kesepakatan belum seluruhnya sampai kepada KKSU," ujar Saepul.

Sedianya para sopir angkutan umum ini hendak menyasar kantor wali kota dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang di Pusat Pemerintahan di jalan Satria Sudirman dan Kantor Dishub di Jalan Dr. Sitanala.

Berdasarkan pantauan Polrestro Tangerang, sekitar 1.000 pengemudi dengan 678 unit angkutan menggelar unjuk rasa. Mereka dikoordinatori Umar dengan mengusung tuntutan penghapusan angkutan online karena merugikan pendapatan sopir angkot.

Namun massa pendemo diantaranya dari sopir angkot R07 jurusan Binong-Pasar Malabar tertahan di titik kumpul Gerbang Perumahan Palem Semi atau samping Giant Mall Palem Semi Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Mereka dilarang konvoi menuju kantor wali kota karena telah ada kesepakatan.

Polisi meminta agar massa tidak bergerak ke kantor wali kota. Namun para sopir menyatakan belum menerima informasi hasil kesepakatan tersebut. "Kami minta tiga hari ke depan ada penertiban angkutan online, kalau tidak massa lebih besar kami kerahkan," kata Umar koordinator lapangan R 07 jurusan Binong-Pasar Malabar.

Diantara armada angkot yang semula hendak berdemo itu adalah R07 Binong -Malabar dengan armada 200 angkot, R06 A Bonang- Cikokol dengan 146 angkot, R06 B Legok-Pos dengan 200 angkot, R19 Perum 2-Gading dengan 72 angkot dan R13 Klp Dua- Perumnas 1 dengan 60 angkot.

Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani menyatakan meskipun secara umum aksi unjukrasa batal, namun pihaknya tetap mengantispasi dengan menyiagakan 25 angkutan di rute-rute tertentu untuk mengangkut penumpang angkutan umum.

(sumber:https://metro.tempo.co/read/853787/angkot-mogok-dishub-tangerang-janji-tertibkan-angkutan-online)

Define Problem. Kali ini berita oleh tempo.co memiiki define problem yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saepul Rohman memastikan akan menertibkan angkutan berbasis online, dan nantinya Dinas Perhubungan akan menggandeng Kepolisian Metropolitan Tangerang Kota dalam penertiban. Hal ini dituliskan pada paragraf pertama dalam berita media online tempo.co edisi 8 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saepul Rohman memastikan akan menertibkan angkutan berbasis online. Dinas Perhubungan akan menggandeng Kepolisian Metropolitan Tangerang Kota dalam penertiban nanti."

Diagnose Causes. Diagnose causes ialah hal tersebut dilakukan sebagai respon atas tuntutan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang meminta angkutan online ditertibkan. Hal ini tertulis pada paragraf pertama, kalimat ketiga pada media online tempo.co edisi 8 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Langkah ini sebagai respon atas tuntutan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang meminta angkutan online ditertibkan."

Moral Judgement. Make moral judgement yang terdapat pada berita yang dimuat tempo.co ini ialah Polisi meminta agar massa tidak bergerak ke kantor wali kota. Hal ini kata Umar koordinator lapangan R 07 jurusan Binong-Pasar Malabar pada media online tempo.co edisi 8 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Polisi meminta agar massa tidak bergerak ke kantor wali kota. Namun para sopir menyatakan belum menerima informasi hasil kesepakatan tersebut. "Kami minta tiga hari ke depan ada penertiban angkutan online, kalau tidak massa lebih besar kami kerahkan," kata Umar koordinator lapangan R 07 jurusan Binong-Pasar Malabar."

Treatment Recommendation. Tretament recommendation yang ada pada berita ini ialah Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani menyatakan meskipun secara umum aksi unjukrasa batal, namun pihaknya tetap mengantispasi dengan menyiagakan 25 angkutan di rute-rute tertentu untuk mengangkut penumpang angkutan umum..

Dan ini diungkapkan pada paragraf terakhir pada kalimat pertama dalam media online tempo.co edisi 8 Maret 2017 sebagai berikut:

> "Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani menyatakan meskipun secara umum aksi unjukrasa batal, namun pihaknya tetap mengantispasi dengan menyiagakan 25 angkutan di rute-rute tertentu untuk mengangkut penumpang angkutan umum."

Tabel 3.6

Pembingkaian berita tempo.co dengan judul "Angkot Mogok, Dishub Tangerang Janji Tertibkan Angkutan Online"

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saepul Rohman memastikan akan menertibkan angkutan berbasis online.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Langkah ini sebagai respon atas tuntutan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang meminta angkutan online ditertibkan.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Polisi meminta agar massa tidak bergerak ke kantor wali kota.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani menyatakan meskipun secara umum aksi unjukrasa batal, namun pihaknya tetap mengantispasi dengan menyiagakan 25 angkutan di rute-rute tertentu untuk mengangkut penumpang angkutan umum.

4. Kategori: Fase Pasca Konflik

Pada kategori "Fase Pasca Konflik" dalam konflik ini melihat bagaimana berita tersebut menggambarkan penyelesaian dari konflik yang terjadi antara pengemudi transportasi berbasis online dan konvensional.

a. Berita kompas.com dengan judul "*Revisi UU LLAJ Dinilai Mendesak untuk Atur "Ojek Online"*", 25 Maret 2017/20:50 WIB

'Revisi UU LLAJ Dinilai Mendesak untuk Atur "Ojek Online"'

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendesak dilakukan. Revisi dibutuhkan untuk mengatur keberadaan ojek online yang saat ini sudah menjamur di kota-kota besar. Nizar mengatakan, belakangan sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kendaraan roda dua sebagai transportasi umum online merupakan kebutuhan masyarakat.

Hanya saja dalam UU LLAJ tidak diatur mengenai kendaraan roda dua tersebut. Akibatnya, dalam peraturan menteri perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang mengatur tentang transportasi online, juga tidak mengatur roda dua sebagai transportasi umum.

"Maka dari itu perlu adanya revisi undang-undang LLAJ itu. Dengan adanya revisi UU LLAJ maka kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat," ujar Nizar dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2017).

Hal ini disampaikan Nizar menanggapi kondisi di kota Bogor yang terjadi ketegangan antara sopir angkot dan pengendara ojek online. Politisi Gerindra ini mengapresiasi rencana Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor memberlakukan aturan berbentuk perda karena adanya kekosongan payung hukum mengenai ojek online.

"Kalau aturan perda itu kan hanya mengikat di daerah bersangkutan. Perda sendiripun harus berpatokan pada landasan hukum diatasnya seperti undang-undang," ujar Nizar.

Nizar juga khawatir peraturan daerah yang diterbitkan tiap kepala daerah akan bertentangan dengan hasil revisi UU LLAJ di kemudian hari.

"Sebaiknya kemenhub responsif dengan masalah ini. Segera revisi UU LLAJ. Untuk apa juga merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 kalau pada akhirnya masih tidak payung hukum untuk ojek online," ucap Nizar.

(Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2017/03/25/20500251/revisi.uu.llaj.dinilai.mendesak.untuk.atur.ojek.online..

Define Problem. Berita yang ditulis oleh kompas.com menyatakan bahwa Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendesak dilakukan Kutipan. Define problem tersebut terdapat pada paragraf pertama alam media online kompas,com edisi 25 Maret 2017, sebagai berikut:

> "Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendesak dilakukan."

Diagnose Causes: Kemudian, diagnose causes dari pernyataan tersebut ialah revisi dibutuhkan untuk mengatur keberadaan ojek online yang saat ini sudah menjamur di kota-kota besar. Hal ini dijelaskan pada paragraf pertama Kalimat kedua dalam media online kompas.com edisi 23 Maret 2107 ini, sebagai berikut:

> "Revisi dibutuhkan untuk mengatur keberadaan ojek online yang saat ini sudah menjamur di kota-kota besar.."

Moral Judgement. Untuk moral judgement, kompas.com menuliskan dengan pernyataan bahwa dengan adanya revisi UU LLAJ maka kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat. Hal ini diungkapkan pada bagian paragraf ketiga pada media online kompas.com edisi 25 Maret 2017 yaitu:

> ""Maka dari itu perlu adanya revisi undang-undang LLAJ itu. Dengan adanya revisi UU LLAJ maka kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat," ujar Nizar dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2017)."

Treatment Recommendation. Berita tersebut juga menyebutkan tretament recommendation, Nizar mengatakan sebaiknya kemenhub responsif dengan masalah ini. Dan segera revisi UU LLAJ. Baginya untuk apa juga merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 kalau pada akhirnya masih tidak

payung hukum untuk ojek online. Hal ini diungkapkan pada paragraf ketujuh pada media online kompas.com edisi 25 Maret 2017, sebagai berikut:

> “"Sebaiknya kemenhub responsif dengan masalah ini. Segera revisi UU LLAJ. Untuk apa juga merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 kalau pada akhirnya masih tidak payung hukum untuk ojek online," ucap Nizar.”

Tabel 3.7

Pembingkaian berita kompas.com dengan judul “Revisi UU LLAJ Dinilai Mendesak untuk Atur "Ojek Online"”

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendesak dilakukan
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Revisi dibutuhkan untuk mengatur keberadaan ojek online yang saat ini sudah menjamur di kota-kota besar.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Dengan adanya revisi UU LLAJ maka kendaraan roda dua atau ojek online memiliki payung hukum yang kuat.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Nizar mengatakan sebaiknya kemenhub responsif dengan masalah ini. Dan segera revisi UU LLAJ. Baginya untuk apa juga merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 kalau pada akhirnya masih tidak payung hukum untuk ojek online

b. Berita tempo.co dengan judul “*Kisruh Angkutan Online, Mabes Polri Mendukung Revisi Permen”*, 25 Maret 2017/15:41 WIB

“Kisruh Angkutan Online, Mabes Polri Mendukung Revisi Permen”

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah mengatur transportasi online. Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian bertugas memberi pelayanan dan pengayoman soal keamanan kepada masyarakat. Tahun ini, kata dia, Polri menetapkan sebagai tahun keselamatan bagi para pengguna lalu lintas.

"Kami melihat transportasi online ini memiliki potensi bergesekan dengan yang konvensional," kata dia dalam Talkshow Akhir Pekan Terhangat Radio Sindotrijaya Network di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2017.

Martin mengatakan kehadiran revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu bisa mengatur transportasi online. Menurut dia, pengaturan itu berisi hak dan kewajiban.

Misalnya, hak semua warga adalah hidup yang layak dan mendapat pekerjaan. Namun kewajiban mereka, misalnya, adalah harus memiliki keterampilan dalam mengemudi, merawat kendaraan, administrasi, dan ada aturan cc kendaraan.

Martin mengatakan belakangan ini ada beberapa peristiwa bentrokan antara pihak transportasi online dan transportasi konvensional. Salah satu contoh di Bogor, menurut Martin, pemerintah daerah juga turun tangan untuk meredakan gejolak itu.

"Kami apresiasi ada kemauan pemerintah daerah yang mengatur dan tidak membiarkan gesekan terjadi," ujar Martinus. Dia pun meminta aparatur, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepolisian turun mensosialisasikan. "Kami melihat bahwa potensi-potensi ini harus dideteksi awal," ujarnya lagi.

(sumber: https://nasional.tempo.co/read/859553/kisruh-angkutan-online-mabes-polri-mendukung-revisi-permen)

Define Problem. Berita yang ditulis oleh tempo.co di atas menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah mengatur transportasi online. Kutipan define problem tersebut terdapat pada

paragraf pertama kalimat kedua dalam media online tempo.co edisi 25 Maret 2017, sebagai berikut:

> “Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah mengatur transportasi online.”

Diagnose Causes: Kemudian, penyebabnya adalah menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul bahwa mereka melihat transportasi online ini memiliki potensi bergesekan dengan yang konvensional. Hal pada dijelaskan pada paragraf pertama kalimat keduadalam media online tempo.co edisi 25 Maret 2107 ini, sebagai berikut:

> “"Kami melihat transportasi online ini memiliki potensi bergesekan dengan yang konvensional," kata dia dalam Talkshow Akhir Pekan Terhangat Radio Sindotrijaya Network di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2017.”

Moral Judgement. Untuk moral judgement, tempo.co menuliskan bahwa Martin mengatakan kehadiran revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu bisa mengatur transportasi online. Menurut dia, pengaturan itu berisi hak dan kewajiban. Hal ini diungkapkan pada bagian paragraf ketiga pada media online tempo.co edisi 25 Maret 2017 yaitu:

> “Martin mengatakan kehadiran revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu bisa mengatur transportasi online. Menurut dia, pengaturan itu berisi hak dan kewajiban.”
>
> ”Damai dan tidak ada lagi pertikaian antara dua kelompok itu,” kata Harry kepada Tempo, Kamis pagi, 9 Maret 2017.

Treatment Recommendation. Berita tersebut juga menyebutkan tretament recommendation, di mana Martin pun meminta aparatur, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepolisian turun mensosialisasikan. Kepolisian melihat bahwa potensi-potensi ini harus dideteksi awal. Hal ini diungkapkan pada paragraf terakhir pada media online tempo.co edisi 25 Maret 2017, sebagai berikut:

> “Dia pun meminta aparatur, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepolisian turun mensosialisasikan. "Kami melihat bahwa potensi-potensi ini harus dideteksi awal," ujarnya lagi.

Tabel 3.8

Pembingkaian berita kompas.com dengan judul "Kisruh Angkutan Online, Mabes Polri Mendukung Revisi Permen"

Kerangka analisis	Indikator
Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah mengatur transportasi online.
Diagnoses Causes (Memeperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul bahwa mereka melihat transportasi online ini memiliki potensi bergesekan dengan yang konvensional.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Martin mengatakan kehadiran revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu bisa mengatur transportasi online. Menurut dia, pengaturan itu berisi hak dan kewajiban.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Martin pun meminta aparatur, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepolisian turun mensosialisasikan. Kepolisian melihat bahwa potensi-potensi ini harus dideteksi awal.